



Marak Rontek Terpaku di Pohon

■ Ratusan APK Pilkada Kota Yogya 2024 Langgar Aturan Pemasangan

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogya mencatat ada ratusan pelanggaran aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Upaya penertiban kini terus dilakukan.

Ketua Bawaslu Kota Yogya, Andie Kartala, berujar, berdasar hasil pendataan, terdapat 547 APK yang dinyatakan melanggar aturan pemasangan selaras Peraturan Wali Kota (Perwal) No 65 Tahun 2024. "Jumlah 500-an itu APK dari ketiga paslon [pasangan calon] peserta Pilkada Kota Yogya 2024," tandasnya, Rabu (16/10).

Andie pun menyampaikan, ratusan pelanggaran sebagian besar merupakan alat peraga kampanye yang dipasang, atau dipaku di pepohonan. Fenomena tersebut, lanjutnya, melampaui angka pelanggaran pemasangan di ruas jalan yang dinyatakan steril dari atribut paslon Pilkada Kota Yogya 2024, sesuai Perwal No 65 Tahun 2024.

"Mayoritas karena dipasang di pohon-pohon. Bisa dilihat itu kan, banyak sekali rontek-rontek yang dipasang, dipaku, di pohon-pohon," ujarnya.

Dijelaskan, surat teguran untuk melakukan perbaikan terkait pemasangan APK, sudah dilayangkan, pihaknya kepada masing-masing paslon melalui sekretariat timnya. Mereka diberikan waktu tiga hari untuk melakukan penertiban secara mandiri, terhadap deretan APK yang didata oleh Bawaslu sebagai pelanggaran.

"Kalau setelah tiga hari ini tidak ditertibkan, selanjutnya kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU. Nanti, KPU akan me-

nindaklanjuti rekomendasi dari kami. KPU punya waktu 7 hari untuk menindaklanjuti itu dan melakukan penertiban. Dalam melakukan penertiban, KPU berkoordinasi dengan Satpol PP, kami juga mendampingi," cetusnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan 100 personel Satpol PP dan aparat gabungan untuk penertiban APK Pilkada 2024 yang melanggar aturan. Namun, sejauh ini, Satpol PP Kota Yogya masih menunggu koordinasi dari KPU berdasar rekomendasi dari Bawaslu.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengatakan, 100 personel itu terdiri dari Satpol PP di tingkat makro dan kemantren Satlinmas, Polresta, hingga TNI. Beberapa waktu lalu, pihaknya pun sudah melakukan pertemuan dengan Bawaslu Kota Yogya untuk membahas penegakan aturan APK dan mekanisme penertibannya.

"Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya. Setelah itu, KPU berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melaksanakan penertiban. Jadi, tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu dulu," tandasnya.

Tunggu rekomendasi
Sampai pekan ketiga

PERLU DITERTIBKAN

- Bawaslu Kota Yogya mencatat ada sekitar 547 alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang terpasang tak sesuai aturan.
- Sebagian besar merupakan alat peraga kampanye yang dipasang atau dipaku di pepohonan.
- APK yang melanggar aturan itu berasal dari tiga pasangan calon peserta Pilkada Kota Yogya.

nindaklanjuti rekomendasi dari kami. KPU punya waktu 7 hari untuk menindaklanjuti itu dan melakukan penertiban. Dalam melakukan penertiban, KPU berkoordinasi dengan Satpol PP, kami juga mendampingi," cetusnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan 100 personel Satpol PP dan aparat gabungan untuk penertiban APK Pilkada 2024 yang melanggar aturan. Namun, sejauh ini, Satpol PP Kota Yogya masih menunggu koordinasi dari KPU berdasar rekomendasi dari Bawaslu.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengatakan, 100 personel itu terdiri dari Satpol PP di tingkat makro dan kemantren Satlinmas, Polresta, hingga TNI. Beberapa waktu lalu, pihaknya pun sudah melakukan pertemuan dengan Bawaslu Kota Yogya untuk membahas penegakan aturan APK dan mekanisme penertibannya.

"Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya. Setelah itu, KPU berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melaksanakan penertiban. Jadi, tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu dulu," tandasnya.

Tunggu rekomendasi
Sampai pekan ketiga

masa kampanye pilkada. Dodi mengaku belum menerima surat rekomendasi, maupun koordinasi dari KPU Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan penertiban APK yang melanggar. Saat ini, Satpol PP masih melakukan koordinasi teknis dengan KPU Kota Yogya, mengenai gudang untuk menyimpan APK yang telah ditertibkan.

"Kami belum menerima (rekomendasi). Satpol PP melaksanakan sosialisasi terkait dengan mekanisme penertiban APK dan melakukan perencanaan operasi penertiban APK, jika memang sudah ada hasil rekomendasi tersebut," ujarnya.

Dalam penertiban APK, Satpol PP mengacu Perwal Kota Yogya No 75 Tahun 2023 tentang APK dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian, Perwal No 65 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas Perwal Kota Yogyakarta No 75 tahun 2023.

"Fasilitasi penertiban APK mengacu khususnya di Pasal 10 Perwal 75 tahun 2023. Fasilitasi penertiban dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pada instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan bahan kampanye. Dukungan itu antara lain berupa sarana prasarana dan personel," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005